

**Kepada Yth**  
**Bapak Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono**  
**Di-**  
**Tempat**

**Hal: Kemerdekaan Belum Berikan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM**

Hiruk pikuk peringatan kemerdekaan Indonesia ke 62 tahun telah berlalu seminggu yang lalu. Kebanggaan dan kecintaan tentang Nasionalisme menjadi sesuatu yang meriah diperbincangkan. Namun diantara itu semua, sudahkah pemaknaan kemerdekaan sejati diterjemahkan ke dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia? Tak bisa dipungkiri perjalanan sejarah bangsa ini telah menoreh berbagai peristiwa pelanggaran HAM; peristiwa 1965/1966, Tanjung Priok 1984, 1989, Trisakti 1998, Mei 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, Pembunuhan Munir 2004, Alas Tlogo 2007 dan berbagai peristiwa pelanggaran HAM lainnya.

Cita-cita awal kemerdekaan adalah membebaskan semua anak bangsa dari segala bentuk penindasan dan perlakuan tidak adil. Cita-cita tersebut menjadi paradoks bila disandingkan dengan korban pelanggaran HAM, pada umumnya keadaan rakyat Indonesia yang masih dirundung berbagai persoalan akibat kebijakan dan tindakan Negara yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat di bangsa ini

Pergantian presiden sejak BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga memberikan perbaikan substantif bagi korban pelanggaran HAM. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM masih terus "digelapkan" tak satupun kebijakan dan tindakan Negara yang secara sungguh-sungguh berupaya melakukan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Para pelaku tak tersentuh hukum, para korban diabaikan, hak atas kebenaran dan keadilan, hak atas informasi, hak atas reparasi tak satupun diupayakan Negara. Yang terjadi sebaliknya, Negara terus mengabaikan segala kewajibannya melalui penolakan-penolakan institusi Negara (Presiden, DPR, Kejaksaan Agung, Pengadilan HAM)

Kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kepemimpinan anda telah berlangsung selama tiga tahun, akankah juga berlalu dengan ketidakpedulian terhadap penegakan dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kami dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM *telah tiga puluh (30)* diam hitam membisu di depan Istana setiap kamis sore pada pukul 16.00-17.00 WIB. Hal ini untuk mendesak adanya tindakan dan tanggungjawab Bapak Presiden selaku pemimpin Negeri ini untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Respon dan tindakan bapak Presiden akan terus kami tagih sampai kami dapatkan kebenaran dan keadilan atas tindakan pelanggaran HAM yang telah menimpa kami.

Pengungkapan kebenaran, terwujudnya keadilan dan tidak berulangnya pelanggaran HAM di Indonesia, itulah makna Kemerdekaan sesungguhnya!

Jakarta, 23 Agustus 2007

**Presidium JSKK**

**Sumarsih**

**Suciwati**

**Bejo Untung**